



Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum., lahir di Lamongan, 25 Agustus 1971. Dosen pada Program Studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember sejak tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana Bali tahun 1997, S2 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003, dan S3 Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana Bali tahun 2013. Beberapa buku yang dihasilkan, antara lain: *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja* (Yogyakarta: Galang Press, 2015), *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya* (Jember: Jember University Press, 2016), *Kartini Kendeng vs Belunggu Semen* (Yogyakarta: Best Publisher, 2017), *Kearsipan: Sejarah, Praktik, dan Problematikanya* (Jember: Jember University Press, 2018).

Sejak diterapkannya Politik Etis pada tahun 1901, maka pendidikan kolonial di Bandung mulai mendapat perhatian serius dari Pemerintah Hindia Belanda. Berbagai jenjang pendidikan didirikan, mulai dari pendidikan rendah (*lager onderwijs*), pendidikan lanjutan (*middelebare onderwijs*), sampai dengan pendidikan tinggi, yaitu *Technische Hooge School*, sebuah sekolah teknik pertama di Indonesia. Hadirnya pendidikan kolonial tersebut, telah memunculkan golongan terpelajar yang dipandang oleh masyarakat Bandung sebagai golongan priyayi. Peranan dan fungsi yang diciptakan oleh perkembangan proses birokrasi, komersialisasi, dan urbanisasi, pada akhirnya banyak dipegang oleh golongan elite baru ini, termasuk keterlibatannya dalam berbagai gerakan nasionalis di Indonesia.



Penerbit:
LaksBang PRESSindo Yogyakarta
member of Laksbang Group
<http://laksbangpressindo.com>
Email: laksbangky@yahoo.com

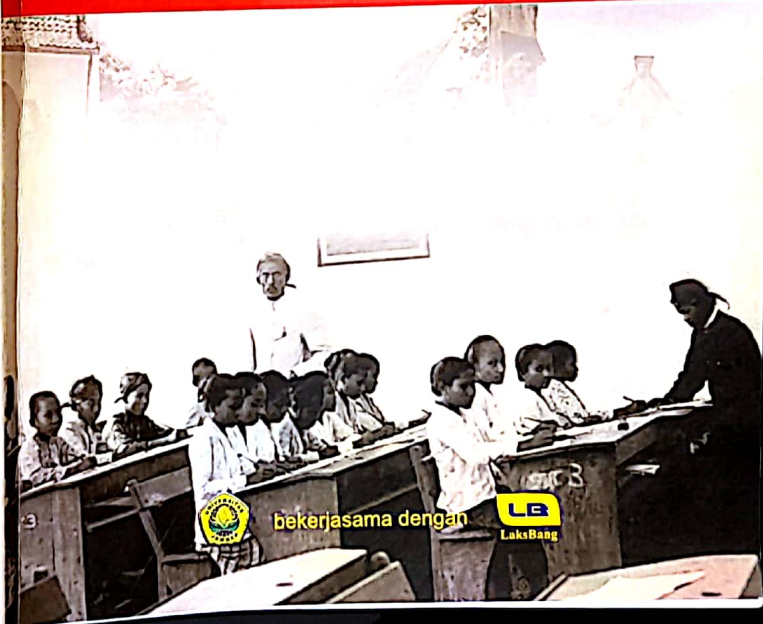
Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.

PENDIDIKAN KOLONIAL DI KOTA BANDUNG

Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.

PENDIDIKAN KOLONIAL

DI KOTA BANDUNG



bekerjasama dengan



**PENDIDIKAN KOLONIAL
DI KOTA BANDUNG**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

PENDIDIKAN KOLONIAL DI KOTA BANDUNG

Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.



PENDIDIKAN KOLONIAL DI KOTA BANDUNG

Penulis : **Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum**

Sampul & Layout : **Bang Joedin**

Cetakan I : November 2018

Kode Produksi : **LBP: 11.18.00202**
xiii + 121 hlm. 16 x 23 cm.

Penerbit : **LaksBang PRESSindo, Yogyakarta**
(Member of LaksBang Group)
<http://laksbangpressindo.com>
E-mail: laksbangyk@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-5452-23-9

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Pendidikan Kolonial di Bandung”. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Secara khusus, rasa hormat dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada almarhum Prof. Dr. T. H. Ibrahim Alfian, M.A., yang semasa hidupnya dengan ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu dan pikiran sepenuhnya untuk memberikan komentar-komentar secara sistematis dan rinci dalam tulisan ini. Semoga budi baik beliau mendapat imbalan pahala, diampuni segala dosanya, dan diterima di sisi Allah swt.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Jember yang telah mendanai penerbitan buku ini melalui Alokasi Dana Kegiatan Pengembangan Mutu Program Studi di Lingkungan Universitas Jember Tahun Anggaran 2018 untuk Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya yang dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 7513/UN25/PR/2018.

Selanjutnya, rasa hutang budi dan terima kasih sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang dengan tulus ikhlas memberi dorongan moril, do’a, dan kasih sayangnya. Kepada istri tercinta, Entiyani Astuti dan anak-anakku tersayang, Alfiyandy Junan Nugraha dan Cindy Putri Intanari, terima kasih

atas pengorbanan dan dukungannya yang tidak ternilai harganya bagi penyelesaian buku ini.

Di dalam penelitian lapangan, penulis banyak mendapat bantuan dan fasilitas, baik dari lembaga maupun perorangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Hadi di Perpustakaan Prof. Dr. Doddy A. Tisna Amidjaja Bandung, yang selalu sabar dalam membantu penulis mengeluarkan bahan pustaka, pegawai Perpustakaan Asia Afrika Bandung, dan pegawai Perpustakaan Gedung Sate Bandung. Demikian pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pegawai perpustakaan di Yogyakarta, yaitu: Perpustakaan Pascasarjana UGM, Perpustakaan PAU Studi Sosial UGM, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Jurusan Sejarah UGM, Perpustakaan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan St. Ignatius, dan Perpustakaan Sono Budoyo. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada bagian pelayanan pengunjung di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional di Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penelitian yang lebih cermat dan mendalam oleh pihak lain diharapkan dapat mengisi kekurangan tersebut. Lepas dari segala kekurangan itu, penulis berharap semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah.

Jember, September 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Glosarium.....	xi
Daftar Singkatan.....	xiii
BAB I PENGANTAR	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
C. Tinjauan Pustaka dan Sumber	7
D. Kerangka Teoretis.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONDISI BANDUNG PADA AKHIR ABAD XIX DAN AWAL ABAD XX.....	19
A. Perkembangan Kota Bandung dan Kondisi Demografis	19
B. Kondisi Ekonomi.....	29
C. Struktur Masyarakat.....	33
D. Sistem Religi dan Adat Istiadat.....	38
BAB III DARI PENDIDIKAN TRADISIONAL KE PENDIDIKAN KOLONIAL	43
A. Kondisi Pendidikan di Bandung sebelum Masuknya Bangsa Barat.....	43

B.	Masuknya Pendidikan Kolonial dan Reaksi Awal Masyarakat di Bandung	49
BAB IV	JENJANG PENDIDIKAN KOLONIAL	
	DI BANDUNG	53
A.	Pendidikan Rendah (<i>Lager Onderwijs</i>).....	53
B.	Pendidikan Lanjutan (<i>Middelbaar Onderwijs</i>)	67
C.	Pendidikan Kejuruan	73
D.	Pendidikan Tinggi: <i>Technische Hooge School</i> (THS) Bandung.....	79
BAB V	PENGARUH PENDIDIKAN KOLONIAL	
	TERHADAP MASYARAKAT DI BANDUNG	85
A.	Reaksi Pendidikan Tradisional	85
BAB VI	KESIMPULAN.....	103
	DAFTAR PUSTAKA	105
	Indeks	113
	Lampiran-Lampiran.....	115

Daftar Tabel

Tabel 1	Perkembangan Luas Kota Bandung dan Luas Daerah Terbangun Tahun 1906-1931	26
Tabel 2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 1889-1906	27
Tabel 3	Uang Bulanan Sekolah Peralihan (<i>Schakelschool</i>)	63
Tabel 4	Uang Bulanan <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i> (MULO)	69
Tabel 5	Kurikulum <i>Hoogere Buger School</i> (HBS) Bandung	72
Tabel 6	Kurikulum <i>Kweekschool</i> Bandung	74

GLOSARIUM

Afdeeling	: Wilayah setingkat kabupaten pada masa Kolonial Belanda.
Ambacht School	: Sekolah Pertukangan.
Ambtenaar	: Pegawai Pemerintah Kolonial.
Besluit	: Surat Keputusan.
Eerste Klasse School	: Sekolah Rendah Kelas Satu.
Europeesche Lagere School	: Sekolah Rendah Eropa.
Gemeente	: Haminte, Kotapraja.
Holandsch Ambonsche School	: Sekolah Ambon-Belanda.
Holandsch Chinese School	: Sekolah Cina-Belanda.
Holandsch Inlandsche School	: Sekolah Bumiputera-Belanda.
Kweekschool	: Sekolah Pendidikan Guru.
Meer Uitgebreid Lager Ondewijs	: Sekolah Rendah yang diperluas, yaitu sekarang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hoofdenschool	: Sekolah Menak atau Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi (Sekolah Pangreh Praja).
Resident	: Orang yang mengepalai wilayah residentie pada masa kolonial.
Schakel School	: Sekolah Peralihan.
Staatsblad van Nederlandsch-Indië	: Lembaran Negara Hindia Belanda.
Technische Hooge School	: Sekolah Tinggi Teknik.
Tweede Klasse School	: Sekolah Rendah Kelas Dua.
Vervogschool	: Sekolah Sambungan.
Volksschool	: Sekolah Desa.

DAFTAR SINGKATAN

- AMS : Algemeen Middelbare School.
ANRI : Arsip Nasional Republik Indonesia.
ELS : Europesche Lagere School.
et al. : et alie.
HAS : Hollandsch Ambonsche School.
HBS : Hoogere Burger School.
HCS : Hollandsch Chineesche School.
HIS : Hollandsch-Inlandsche School.
Ibid : Ibidem.
IP : Indische Partij
ISV : Indonesische Studenten Vereeniging
loc. cit. : loco citato.
MOSVIA: Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren.
MULO : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.
MvO : Memorie van Overgave.
op. cit. : opere citato.
OSVIA : Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren.
PI : Perhimpunan Indonesia
THS : Technische Hooge School.

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Penduduk bumiputera sudah mengenal sistem pendidikan yang bersifat tradisional, sebelum orang-orang Barat datang ke Indonesia dan memperkenalkan sistem pendidikannya.¹ Pendidikan tradisional tersebut, secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) Pendidikan yang diadakan di *langgar* atau *surau*; dan (2) Pendidikan yang diadakan di pesantren. Di kedua tempat tersebut, pendidikan dipimpin oleh seorang atau beberapa orang kyai, yang di Bandung disebut *ajengan*.²

Sistem pendidikan kolonial di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terutama di Jawa sekitar tahun 1840-an, yaitu sekolah *gubernemen* bagi orang-orang pribumi. Sekolah ini memiliki kurikulum yang jelas, anggaran belanja, persyaratan untuk masuk, serta tenaga guru yang mempunyai klasifikasi ijazah tertentu. Sistem pengajarannya menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah masing-masing

¹ I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Mij, 1938), hlm. 1.

² I. Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV. Ilmu, 1959), hlm. 109.

(*landstaal*), Bahasa Melayu, dan Bahasa Belanda. Guna mempersiapkan tenaga pengajar bagi sekolah *gubernemen*, di Bandung dibuka sekolah guru (*Kweekschool*) pada tanggal 23 Mei 1866 oleh F.K. Holle, seorang yang telah mempelajari dan mengenal baik masyarakat dan kebudayaan Sunda.³

Apabila dicermati, tujuan pendidikan kolonial tidak dinyatakan secara tegas. Tujuan pendidikan adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh bagi kepentingan kaum modal Belanda. Penduduk setempat dididik untuk menjadi buruh-buruh tingkat rendah (buruh kasar), ataupun untuk memperoleh tenaga kerja yang murah. Ada juga sebagian tenaga kerja yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknis, tenaga pertanian, dan lainnya, yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau tiga.⁴

Djoko Suryo,⁵ menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kolonial berorientasi pada prinsip-prinsip garis warna (*color line*), diskriminasi, segregasi, dan non akulturatif. Prinsip-prinsip ini direalisasikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dibedakan menurut jenis dan tingkatan berdasarkan pembagian golongan masyarakat kolonial, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi.

Di dalam penyelenggaraan pendidikan kolonial, juga dibedakan menurut status sosial, yaitu untuk kaum elite dan untuk rakyat kebanyakan. Pemisahan menurut golongan masyarakat dan status sosial itu, dipertegas dengan deferensiasi dalam hal

³ Edi S. Ekadjati, *et al.*, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998), hlm. 60-61.

⁴ Moestoko Soemarsono, *et al.*, *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 64.

⁵ Djoko Suryo, "Pendidikan, Differensiasi Kerja, dan Pluralisme Sosial: Dinamika Sosial Ekonomi 1900-1990", makalah disampaikan pada Kongres Sejarah Nasional Indonesia di Jakarta pada tanggal 12-15 Nopember 1996.

penggunaan bahasa pengantar, yaitu: Bahasa Belanda untuk pendidikan orang Eropa dan golongan elite pribumi, dan Bahasa Melayu atau bahasa daerah untuk pendidikan golongan rakyat kebanyakan.

Pada awal abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia mulai memperhatikan pemberian perlindungan pada hak dan kepentingan penduduk pribumi. Hal itu dirasakan sebagai “kewajiban moral” untuk mengangkat derajat anak negeri yang dijajah. Politik kolonial ini disebut Politik Etis yang mempunyai tiga program pokok, yaitu: edukasi, irigasi, dan emigrasi.⁶ Diterapkannya Politik Etis, mengakibatkan kemajuan pada bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang berorientasi Barat semakin banyak didirikan di Bandung.

Pada sekitar tahun 1920-an, di Bandung terdapat bermacam-macam jenis sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Dari pendidikan rendah (*lager onderwijs*), pendidikan lanjutan (*Middelbare onderwijs*), sampai dengan pendidikan kejuruan. Suatu peristiwa penting dalam perkembangan pendidikan kolonial di Bandung adalah dibukanya sekolah kejuruan *Technische Hooge School* (THS) pada tanggal 3 Juli 1920, sebuah sekolah tinggi teknik pertama di Hindia Belanda.⁷ Perguruan tinggi ini punya arti historis bagi bangkitnya kesadaran nasional Bangsa Indonesia.

Pendidikan kolonial telah memunculkan golongan terpelajar yang dipandang oleh masyarakat sebagai golongan priyayi.

⁶ Pandangan ini dikemukakan pada tahun 1899 oleh C.Th. van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah menetap di Indonesia selama tahun 1880-1897, dan menulis sebuah artikel berjudul “Een Eereschuld” atau “Hutang Kehormatan” dalam majalah *De Indische Gids*. Lihat: M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Terj. Dharmono Hardjowidjono) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1955), hlm. 227-228; Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: Grafiti Press, 1989), hlm. 2.

⁷ MvO. Residen Priangan Tengah P.R.W. van Gesseler Verschuur, Juli 1926 – September 1929.

Status priyayi kemudian menjadi cita-cita utama pada masa itu, meskipun status priyayi yang diperoleh merupakan hasil dari pendidikannya, bukan dari faktor keturunan.⁸ Pendidikan kolonial dianggap sebagai lambang status sosial karena dengan memasuki pendidikan modern itu, orang-orang pribumi mempunyai kebanggaan tersendiri dan dianggap sebagai kelompok priyayi.⁹ Pendidikan merupakan tumpuan dan harapan bagi orang pribumi yang menginginkan kehidupan yang lebih baik.

Para elite baru tersebut di atas, sebagian ada yang menyatu dalam jaringan birokrasi pemerintah kolonial dan sebagian lagi membentuk suatu kekuatan yang berseberangan dengan pemerintah kolonial. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang aktif dalam berbagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial, baik sebagai guru atau siswa bersama dengan mereka yang berasal dari lembaga pendidikan non formal lainnya (pendidikan tradisional). Penentangan terhadap pemerintah kolonial tersebut, dilakukan dengan menyatukan diri lewat berbagai organisasi pergerakan yang modern.¹⁰ Organisasi politik maupun sosial budaya hasil bentukan elite baru tersebut, mampu mengatasi identitas yang bersifat primordial, seperti: ikatan keluarga, daerah, dan suku (etnisitas).¹¹ Kenyataan ini, membawa konsekuensi tersendiri bagi Pemerintah Kolonial Belanda.

⁸ R.Z. Leirissa, *Terwujudnya Suatu Gagasan: Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) hlm. 61-62; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 282.

⁹ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 114-117; Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 7; Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Terj. Zahara Deliar Noer) (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 89.

¹⁰ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 - 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 16.

¹¹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 235-236.

Pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, justru menjadi bomerang bagi sistem pemerintahannya.¹² Hal itu terjadi karena sistem pendidikan kolonial telah mempercepat munculnya golongan intelegensia yang kemudian memegang peranan dan fungsi-fungsi yang diciptakan oleh perkembangan proses birokrasi, komersialisasi, dan urbanisasi. Mereka memegang peranan dalam berbagai lapangan pekerjaan, seperti: guru, pegawai administrasi, dan sebagainya.

Fenomena itu sangat menarik untuk diteliti karena diterapkannya pendidikan kolonial oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Bandung telah memunculkan golongan elite baru yang membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, seperti: adanya nilai-nilai atau norma-norma baru yang dapat merubah adat lama, serta ketertarikan masyarakat kepada organisasi-organisasi modern. Pendidikan kolonial merupakan kunci bagi terjadinya perubahan di dalam masyarakat Bandung yang kebudayaannya berdasarkan pada pola-pola tradisional.

Bertitik tolak dari fenomena tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan:

- (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya pendidikan kolonial di Bandung?;
- (2) Bagaimanakah perkembangan pendidikan kolonial tersebut?;
- (3) Dampak apa sajakah yang ditimbulkan setelah diterapkannya sistem pendidikan kolonial di Bandung?

Lingkup temporal yang dikaji dalam penulisan ini adalah awal abad ke-20, khususnya tahun 1900 sampai dengan tahun 1942. Pengambilan temporal ini didasari oleh suatu asumsi bahwa periode ini merupakan tumbuh dan berkembangnya pendidikan kolonial di

¹² H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Terj. Daniel Dhakidae) (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 58.

Bandung. Batasan temporal penulisan ini di mulai pada tahun 1900 karena pada tahun tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda mulai memperhatikan sistem pendidikannya, yang juga merupakan awal dari perkembangan pendidikan kolonial di Bandung. Pengambilan angka tahun 1942 sebagai batasan akhir penulisan karena pada tahun tersebut, kekuasaan kolonial Belanda di Bandung telah berakhir, sehingga mengakibatkan kebijakan pendidikan kolonial juga ikut berakhir.

Adapun lingkup spasial dalam penulisan ini adalah Kota Bandung. Bandung yang dimaksud adalah Ibukota Karesidenan Priangan pada masa kolonial Belanda. Pilihan jatuh pada Kota Bandung karena di tempat ini pertama kalinya didirikannya *Technische Hooge School*, sebuah perguruan tinggi pertama di Indonesia.¹³ Perguruan tinggi ini punya arti historis bagi bangkitnya kesadaran nasional Bangsa Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan sejarah pendidikan kolonial, khususnya di Bandung belum mendapat perhatian dari para sejarawan akademis. Di antara mereka, memang ada yang telah menyinggung tentang pendidikan, sepanjang ada relevansinya dengan tema yang digarapnya. Kajian yang mendalam dan rinci mengenai pendidikan kolonial dan pengaruhnya bagi munculnya kesadaran nasional, khususnya di Bandung belum ada. Oleh karena itu, sejarah pendidikan kolonial di Bandung perlu dikaji.

Tulisan ini bertujuan untuk merekonstruksi pendidikan kolonial di Kota Bandung tahun 1900 sampai dengan 1942. Proses perkembangan pendidikan yang panjang tersebut, memiliki arti

¹³ *Profil Propinsi Republik Indonesia: Propinsi Jawa Barat* (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusa, 1992), hlm. 355-356.

penting bagi sejarah Bangsa Indonesia. Pada periode ini, Pemerintah Kolonial Belanda memantapkan kekuasaannya di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan politik.

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat: *pertama*, memberikan sumbangan penulisan sejarah pendidikan di Indonesia; *kedua*, memberikan suatu gambaran tentang kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di Bandung, sehingga dapat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan dalam mengelola dunia pendidikan masa sekarang dan yang akan datang.

C. Tinjauan Pustaka dan Sumber

Penelitian mengenai pendidikan banyak dilakukan, baik oleh sejarawan maupun mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Informasi mengenai pendidikan bisa didapatkan dari karya Mochamad Hasan, “*Sekolah Menak*” *Gedenkboek Mosvia 1879-1929*.¹⁴ Buku ini memberikan informasi mengenai kehidupan para bangsawan Sunda (*menak*) dan usahanya dalam memperoleh pendidikan kolonial. Akan tetapi, buku ini hanya memberikan informasi mengenai pendidikan di MOSVIA saja.

S.L. Van der Wahl dalam bukunya yang berjudul *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië 1900-1940*,¹⁵ merupakan kumpulan dokumen yang memuat dasar-dasar politik Belanda bagi setiap keputusan dan pembaharuan di bidang pendidikan, di antaranya: memuat materi mengenai pendidikan pertanian, teknik, guru, sekolah pertanian, dan lain-lain. Buku ini juga berisi surat menyurat yang bersifat formal antara menteri koloni, direktur pendidikan, gubernur jenderal dan pejabat lokal yang

¹⁴ Mochamad Hasan, “*Sekolah Menak*” *Gedenkboek Mosvia 1879-1929* (Bandung: Mijvorkink, 1929).

¹⁵ S.L. Van der Wahl, *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië 1900-1940* (Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Mij, 1963).

menyangkut bidang pendidikan. Di dalam buku ini, tidak dibahas tentang pelaksanaan dan dampak dari kebijakan politik tersebut di atas.

M. Vastenhow dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de Vooroorlogsche Paedagogische Problemen in Indonesia*,¹⁶ memberikan gambaran tentang perkembangan dan masalah pendidikan di Indonesia. Buku ini juga menerangkan organisasi pengajaran dan bahasa pengantar yang digunakan dalam pendidikan. Kemudian, I.J. Brugmans dalam bukunya yang berjudul *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië*,¹⁷ berisi tentang politik kolonial Hindia Belanda terutama yang menyangkut pendidikan. Hanya saja, buku ini lebih menjelaskan keadaan sekolah-sekolah negeri daripada sekolah-sekolah swasta.

Nina Herlina dalam disertasinya yang berjudul “Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942”,¹⁸ memberikan sedikit informasi tentang pendidikan di Bandung. Di dalam bab IV disertasinya, dijelaskan bagaimana kaum *Menak* menerima pendidikan kolonial. Sementara itu, Haryoto Kunto menulis buku berjudul *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*,¹⁹ berisi cikal bakal kota Bandung sampai dengan masa kolonial. Buku ini memuat sedikit informasi tentang pendidikan pada masa kolonial di Bandung karena penekanan buku ini lebih pada karya-karya arsitektur kolonialnya.

Tulisan lain yang memuat tentang pendidikan adalah karya Edi S. Ekadjati, *et al.*, berjudul *Sejarah Pendidikan Daerah*

¹⁶ M. Vastenhow, *Inleiding tot de Vooroorlogsche Paedagogische Problemen in Indonesia* (Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Mij, 1964).

¹⁷ I.J. Brugmans *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Mij, 1938).

¹⁸ Nina Herlina, “Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942” (Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UGM, 1997).

¹⁹ Haryoto Kunto, *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe* (Bandung: PT. Granesia, 1984)

Jawa Barat.²⁰ Buku ini menguraikan pendidikan secara umum, baik pendidikan tradisional, pendidikan model barat, kondisi pendidikan pada masa pendudukan Jepang dan pada masa kemerdekaan Indonesia di Jawa Barat, termasuk di dalamnya Bandung. Selanjutnya, S. Nasution dalam bukunya berjudul *Sejarah Pendidikan Indonesia*²¹ menguraikan pandangan umum tentang politik dan penyelenggaraan pendidikan kolonial, sekolah untuk pribumi sebelum reorganisasi tahun 1829 sampai dengan berdirinya pendidikan tinggi. Akan tetapi, buku ini hanya membicarakan sekolah-sekolah umum dan mengabaikan sekolah kejuruan. Di samping itu, uraian tentang jenis sekolah-sekolah sangat singkat.

Dari telaah beberapa buku seperti tersebut di atas, jelaslah bahwa belum ada penulis yang mengarahkan perhatiannya, khusus pada upaya penulisan sejarah pendidikan di Bandung. Ketersediaan sumber di dalam penulisan tentang pendidikan kolonial di Bandung 1900-1942, merupakan masalah pokok. Oleh karena itu, untuk menjelaskan persoalan yang telah diajukan dalam penulisan ini diperlukan sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Adapun sumber yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain: *Koloniaal Verslag* (laporan kolonial), yang merupakan laporan tahunan dari berbagai dinas dan instansi, serta para pejabat di bidangnya, yang dibicarakan oleh menteri urusan jajahan sebagai pidato pertanggungjawaban di depan parlemen. Laporan kolonial ini memuat berbagai peristiwa politik, termasuk di dalamnya tentang pendidikan setiap tahunnya di seluruh wilayah Hindia Belanda. Selain itu, digunakan juga *Besluit* (keputusan pemerintah), *Memorie van Overgave* (laporan atau catatan serah terima jabatan antara gubernur, residen, asisten residen, kontrolir lama dengan pejabat

²⁰ Edi S. Ekadjati, *et al.*, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986)

²¹ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

baru yang menggantikannya, yang berisi tentang pemerintahan, pendidikan, agama, keadaan penduduk, kondisi ekonomi, dan situasi politik), *Staatsblad* (lembaran negara) dan *Bijblad* (lampirannya). *Staatsblad* dan *bijblad* merupakan kumpulan peraturan dan keputusan yang diterbitkan untuk diberlakukan di seluruh wilayah Hindia Belanda. Sumber ini digunakan untuk mengungkap dasar hukum dan keabsahan suatu peraturan, serta penerapannya.²²

D. Kerangka Teoretis

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap gejala sejarah yang berkaitan dengan kehadiran pendidikan kolonial di Bandung dengan titik fokus perhatiannya adalah proses masuk dan berkembangnya sistem pendidikan kolonial di kalangan penduduk bumiputra Bandung. Di dalam merekonstruksi perkembangan pendidikan kolonial di Bandung tidak hanya penggambaran secara kronologis saja, akan tetapi diperlukan suatu analisis terhadap fenomena yang ditemukan. Eksplanasi yang memadai atas suatu peristiwa sejarah yang bersifat kompleks, dapat diperoleh dengan menggunakan suatu pendekatan dari ilmu sosial.²³ Penggunaan pendekatan ini, menuntut sejarawan untuk menggunakan teori dan konsep dari ilmu sosial lainnya, baik sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan sebagainya. Penggunaan teori dan konsep tersebut, dapat menjelaskan di dalam mencari kondisi kausalitas suatu fenomena sejarah dan dapat memperkuat analisis masalah.²⁴

²² Bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun *staatsblad* dapat bermacam-macam. Salah satunya adalah Surat Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal, jika Pemerintah Kolonial Belanda memandang keputusan tersebut, perlu diundangkan dan diketahui oleh banyak orang.

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan...*, hlm. 14-21.

²⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani di Banten* (Terj. Hasan Basari) (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 24-25.

Guna membantu mengarahkan penulisan ini, beberapa konsep yang digunakan perlu mendapat kejelasan. Konsep yang dimaksud, antara lain: pendidikan, mobilitas sosial, dan elite.

Menurut J.S. Furnivall, pendidikan adalah penyampaian pengetahuan secara vertikal dari sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk itu kepada mayoritas yang belum mengetahui menurut saluran lembaga modern yang terkoordinasi, yang penyelenggaraannya menurut sistem dan aturan tertentu.²⁵ Pendidikan biasanya dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan.²⁶ Pendidikan yang dimaksud dalam tulisan ini, yakni pendidikan kolonial yang diselenggarakan berdasarkan sistem dan aturan tertentu oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Pendidikan paling awal di Bandung adalah pendidikan tradisional, yaitu pendidikan Islam yang diberikan oleh ulama atau guru agama, yang dilakukan di masjid atau langgar. Pendidikan model ini tidak mengenal kurikulum dan sistem tertentu, akan tetapi mempunyai tujuan pokok, yaitu agar murid dapat membaca dan memahami kitab suci Al-qur'an. Pendidikan kolonial mulai diperkenalkan di Bandung pada tahun 1866. Pada awalnya, pendidikan ini hanya untuk putra-putra bangsawan Sunda (kaum *Menak*). Di dalam perkembangannya, pendidikan kolonial juga diberikan kepada anak-anak dari keluarga biasa.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19 memperkenalkan sistem birokrasi baru yang lebih menekankan pada rasionalitas, efisiensi, dan produktivitas, maka masyarakat Bandung, khususnya golongan *Menak* dituntut untuk melakukan akomodasi dengan mendudukkan diri mereka sebagai bagian

²⁵ J.S. Furnivall, *Educational Progress in Southeast Asia* (New York: International Secretariat Institute of Pasific Relations, 1943), hlm. 5.

²⁶ Dardji Darmodihardjo, *Analisis Pendidikan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1980), hlm. 16.

dari birokrasi kolonial. Apabila sebelumnya pendidikan tinggi dalam hirarki kepegawaian Hindia Belanda diberikan atas dasar keturunan, maka adanya politik kolonial yang baru menjadikan pendidikan sebagai ukuran utama. Hal ini mengakibatkan mobilitas sosial dalam masyarakat Bandung.

Mobilitas sosial merupakan gerakan dari individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok dari satu posisi ke posisi sosial lainnya. Perubahan dalam posisi sosial, seperti: variasi-variasi pekerjaan, pendapatan kekayaan, dan kelas merupakan perhatian utama dari mobilitas sosial.²⁷ Marvin E. Olsen menjelaskan bahwa mobilitas sosial dapat terjadi apabila seorang pelaku merubah satu statusnya atau lebih dalam pola stratifikasi yang lebih luas. Mobilitas sosial biasanya berjalan lambat karena kaum elite enggan melepaskan porsi kekuasaannya, walaupun tidak dapat menolak perubahan.²⁸

Garis perkembangan elite Indonesia menurut Robert van Niel dalam bukunya *Munculnya Elite Modern Indonesia* adalah dari yang bersifat tradisional, berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan pendidikan. Menurutnya, munculnya elite modern Indonesia adalah konsekuensi logis dari politik etis yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu bagian utama dari program Pemerintah Kolonial Belanda.²⁹

Studi tentang Pendidikan Kolonial Di Kota Bandung 1900 – 1942, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi dengan menitikberatkan pada teori struktural fungsional.³⁰ Me-

²⁷ David L. Sills, (ed.), *International Encyclopedia of The Social Sciences Vol. 13 and 14* (New York: The Macmillan Company and The Free Press), hlm. 429.

²⁸ Marvin E. Olsen, *The Process of Social Organization* (New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co., 1968), hlm 197-199.

²⁹ Robert van Niel, *op. cit.*, hlm 12.

³⁰ Taufik Abdullah, (ed.), *op. cit.*, hlm. 310-311.

nurut Jonathan H. Turner, teori struktural fungsional merupakan salah satu pendekatan sosiologi yang sangat berguna untuk menganalisis fenomena historis.³¹ Penggunaan pendekatan ini sangat relevan dalam menjelaskan fungsi-fungsi lembaga dan pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat Bandung. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan bagaimana status sosial, hubungan-hubungan sosial, struktur kekuasaan dan fungsinya.³² Di samping itu, pendekatan struktural fungsional juga membantu memperjelas bagaimana posisi kaum elite pribumi dalam menghadapi perubahan zaman akibat perkembangan pendidikan kolonial di Bandung.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan atas studi arsip dan kepustakaan untuk melakukan rekonstruksi peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan pendidikan kolonial di Bandung. Di dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah (*historical method*)³³, dengan harapan agar hasil tulisan lebih terarah dan terpadu.

Penerapan metode sejarah meliputi empat tahapan, yaitu: *tahap pertama* adalah heuristik atau proses menemukan dan

³¹ Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Illionois: Dorbey Press, 1978) hlm xii.

³² J. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 8-9.

³³ Metode Sejarah merupakan sekumpulan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis, kemudian menjelaskannya dalam suatu sintesis. Lihat: Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33; Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (New York: Alfred A. Kopf, 1956, hlm. 27-28; Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Inti Idayu, 1978), hlm. 10-12.

mengumpulkan sumber, baik itu sumber primer ataupun sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip atau dokumen sejarah yang sezaman dengan penelitian ini. Sumber primer diperoleh di berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional di Jakarta. Di antara sumber primer mengenai pendidikan di Bandung pada masa kolonial, yang lebih bersifat resmi adalah memori serah terima jabatan (*Memorie van Overgave*) dari seorang residen yang telah mengakhiri masa jabatannya. *Memorie van Overgave* tersebut, umumnya berisi laporan umum, antara lain mengenai geografis, kependudukan, pemerintahan, kesehatan, agama, termasuk laporan tentang pendidikan. Sumber-sumber lainnya berupa manuskrip surat gubernur jenderal (*besluit*), lembaran negara (*staatsblad*) dan lampirannya (*bijblad*). Sumber-sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku dan artikel karya peneliti terdahulu, seperti tesis dan disertasi yang terkait dengan pembahasan. Sumber ini berguna untuk bahan pijakan dalam menelusuri sumber-sumber yang lainnya. Sumber-sumber tersebut, terdapat di berbagai koleksi perpustakaan di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Di Bandung, sumber-sumber ini diperoleh dari Perpustakaan Prof. Dr. Doddy A. Tisna Amidjaja, Perpustakaan Asia Afrika, dan Perpustakaan Gedung Sate. Di Jakarta, sumber-sumber ini diperoleh di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun di Yogyakarta, sumber ini diperoleh di Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sono Budoyo, Perpustakaan Yayasan Hatta, Perpustakaan Ignatius, Perpustakaan Jurusan Sejarah, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan Perpustakaan Pascasarjana UGM. Pada tahapan ini, studi pustaka mutlak dilakukan sebagai upaya untuk membangun kerangka dan landasan pemikiran. Di samping itu, studi pustaka juga digunakan untuk memperoleh pembahasan masalah tertentu yang berhubungan dengan pendidikan.

Tahapan kedua adalah kritik sumber, yaitu setelah semua sumber terkumpul, maka dilakukan penilaian terhadap sumber-sumber tersebut, baik secara ekstern maupun intern.³⁴ Gunanya adalah untuk mencari sumber-sumber yang otentik dan kredibel, serta untuk memilah-milah sumber-sumber yang asli dan sumber yang diperlukan dalam studi ini. Kritik ekstern dilakukan terhadap bahan material dokumen, seperti pada kertas dan tinta yang digunakan untuk memperoleh kepastian bahwa bahan tersebut benar-benar berasal dari zamannya (asli). Kritik ekstern terhadap sumber arsip sangat sulit dilakukan karena sumber arsip umumnya telah melalui proses penggandaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan kebenaran sumber melalui tanggal pembuatan sumber dengan membandingkan pada sumber yang lain mengenai penulisannya. Adapun kritik intern, misalnya dengan melihat apakah ada kata yang terselip pada setiap halaman, termasuk mengenai penggunaan ejaan dan gaya bahasanya.

Di dalam menganalisis sumber, hendaknya dilakukan secara hati-hati karena bagaimanapun suatu laporan, misalnya *Memorie van Overgave*, akan mengandung unsur-unsur subyektivitas yang menyangkut kepentingan pemerintah kolonial dan interpretasi dari sudut pandang Eropasentris. Namun demikian, laporan ini patut dihargai karena disusun secara sistematis dan rinci, sehingga banyak memberikan informasi yang sangat berguna bagi bahan penulisan sejarah. Di samping itu, laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah kolonial, ditulis oleh pejabat yang berwenang dan mengetahui kondisi di lapangan.

³⁴ Kritik intern adalah kritik atas sumber yang ditujukan untuk menemukan apakah nilai sumber dokumen ini memiliki kadar kredibilitas tinggi (bersifat kualitatif), sedangkan kritik ekstern adalah kritik untuk mengetahui kebenaran masa pembuatan, tempat, pembuatnya, analisis bahannya, dan bentuk asli dokumen. Lihat : Gilbert J. Garraghan, *op. cit.*, hlm.168.

Tahap ketiga adalah interpretasi guna memperoleh sejumlah fakta yang terkandung dalam berbagai dokumen. Fakta-fakta tersebut, kemudian dirangkaikan dalam satu kesatuan yang serasi dan logis, sehingga menghasilkan cerita sejarah sebagai tahap akhir dari kerja sejarawan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, akan diperoleh suatu realitas masa lampau tentang perkembangan pendidikan kolonial di Bandung tahun 1900–1942.

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi dalam enam bab, yang pada masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Pada masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Bab I merupakan bab pengantar yang berisikan: latar belakang dan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sumber, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Penelitian tentang Pendidikan Kolonial di Kota Bandung perlu memperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan muncul dan berkembangnya pendidikan kolonial tersebut. Oleh karena itu, pada Bab II dibicarakan mengenai kondisi Bandung pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sub bab II, meliputi: perkembangan Kota Bandung dan kondisi demografis, kondisi ekonomi, struktur masyarakat, sistem religi dan adat istiadat.

Bab III membahas tentang situasi pendidikan sebelum kedatangan bangsa Barat, munculnya pendidikan kolonial, dan reaksi awal masyarakat di Bandung. Selanjutnya, Bab IV berisi pembahasan mengenai jenjang pendidikan kolonial di Bandung. Sub bab IV ini meliputi: pendidikan rendah, pendidikan lanjutan, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi.

Bab V menyoroti dampak pendidikan kolonial terhadap masyarakat di Bandung. Permasalahan pokok yang disoroti adalah reaksi pendidikan tradisional, munculnya elite modern, dan munculnya pergerakan nasional. Selanjutnya, Bab ke VI adalah pokok bahasan terakhir dari penulisan ini, merupakan kesimpulan yang telah dirumuskan dari uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KONDISI BANDUNG PADA AKHIR ABAD XIX DAN AWAL ABAD XX

A. Perkembangan Kota Bandung dan Kondisi Demografis

Bandung¹ merupakan sebuah kota kabupaten di wilayah Pegunungan Priangan. Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung pada tanggal 25 September 1810. Pendirian Kota Bandung erat kaitannya dengan pembuatan Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Pembuatan Jalan Pos ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels (1808-1811), dimak-

¹ Mengenai asal-usul nama Bandung terdapat berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Bandung berasal dari kata "*Bendung*". Pendapat ini dikaitkan dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum oleh lahar akibat meletusnya Gunung Tangkuban Perahu pada zaman prasejarah, sehingga daerah di sebelah barat (Dataran Batujajar sampai Padalarang) dan daerah di sebelah timur (dataran Bandung sampai Cicalengka) dari Sungai Citarum tergenang air, hingga menjadi sebuah "danau besar". Pendapat lain menyebutkan, bahwa kata Bandung berarti "besar". Pendapat ini dikaitkan dengan luasnya genangan air. Genangan air yang tenang, luas, dan menyeramkan tersebut, di dalam Bahasa Sunda disebut "*ngabandeng*". Diduga kata "*bandeng*", kemudian berubah menjadi kata "bandung". Lihat: Nina Herlina Lubis, *et al.*, *Sejarah Kota-kota Lama Di Jawa Barat* (Bandung: Alqaprint, 2000), hlm.1-2.

sudkan untuk memperlancar komunikasi di Pulau Jawa, sehingga seluruh daerah dapat diawasi dan dijangkau dengan cepat. Di daerah Kabupaten Bandung, pembuatan Jalan Raya Pos tidak tepat melalui ibukotanya, sehingga Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels mengusulkan agar Ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke Cikapundung. Pemindahan Ibukota Bandung ini dimaksudkan agar pembuatan Jalan Raya Pos tidak menemui hambatan karena Cikapundung terletak pada lintasan Jalan pos tersebut.²

Di Bandung, Jalan Raya Pos membentang dari Cihea di bagian barat sampai dengan Ujungberung Kaler di bagian timur laut (daerah perbatasan dengan Kabupaten Sumedang). Di bagian tengah daerah Bandung, Jalan Raya Pos melintasi Sungai Cikapundung (sekarang Jalan Asia Afrika).³ Tidak diketahui secara pasti berapa luas Kota Bandung dan jumlah penduduknya pada saat pertama kali dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung.⁴

Pada waktu Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung tersebut di atas, sarana dan fasilitas kota yang ada belum memadai. Meskipun sudah disebut *dayeuh* atau kota, tetapi keadaannya mirip sebuah desa, meliputi beberapa perkampungan, seperti: Kampung Bogor (Kebon Kawung), Kampung Cikalintu, dan Kampung Balubur Hilir. Kampung-kampung itu, satu sama lainnya masih dipisahkan oleh hutan.⁵

Jalur darat yang menghubungkan Batavia, Bogor, Cianjur,

² Bekas Ibukota Kabupaten Bandung (Karapyak), sekarang menjadi Kota Kecamatan Dayeuhkolot, terletak kurang lebih 11 km di sebelah selatan Kota Bandung. Lihat: *Sejarah Kota Bandung: Periode Revolusi Kemerdekaan 1945 – 1950* (Bandung: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981), hlm. 6-7.

³ Nina Herlina Lubis, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 125-126.

⁴ Moh. A. Affandie, *Bandung Baheula*, Jilid ke-2 (Bandung: Guna Utama, 1969), hlm. 7.

⁵ Edi S. Ekadjati, *et al.*, *Sejarah Kota Bandung 1945-1979* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1985), hlm. 29.

BAB III

DARI PENDIDIKAN TRADISIONAL KE PENDIDIKAN KOLONIAL

A. Kondisi Pendidikan di Bandung sebelum Masuknya Bangsa Barat

Sebelum orang-orang Barat (Belanda) datang ke Indonesia dan memperkenalkan sistem pendidikannya, Bangsa Indonesia telah mengenal sistem pendidikan yang bersifat tradisional.¹ Pendidikan tradisional ini sudah ada sejak masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Pendidikan tradisional tersebut, diberikan oleh golongan Brahmana. Golongan ini mengajarkan ilmu-ilmu theologia, sastra, bahasa, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu perbintangan, ilmu pasti, seni bangunan, perhitungan waktu, seni rupa, dan pengetahuan lainnya.² Sistem pendidikannya dinamakan sistem “Guru Kula”, yaitu pendidikannya dilakukan di padepokan kepada

¹ I.G. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Mij, 1938), hlm 1.

² Moestoko Soemarsono, *et al.*, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1985), hlm. 60.

para murid dalam jumlah yang terbatas.³

Para murid biasanya tinggal bersama guru, sedangkan istri guru dianggap sebagai ibu mereka. Sang guru tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi sewaktu-waktu menerima pemberian sukarela dari orang tua murid. Para murid juga bekerja secara suka rela membantu pekerjaan keluarga guru.⁴ Selain dengan sistem padepokan, seorang bangsawan atau pejabat kerajaan dapat meminta guru datang ke istana untuk mengajar putra-putri mereka.⁵ Pendidikan tradisional tersebut terus berlanjut, disusul kemudian dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.

Pendidikan Islam merupakan bagian dari perkembangan agama Islam. Pada awal pengaruh agama Islam di Indonesia, keadaan pendidikan Islam masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah menyelenggarakan pendidikan Islam menurut keadaan daerahnya masing-masing⁶ Sistem Pendidikan Islam, secara umum dibedakan atas dua macam, yaitu: (1) Pendidikan yang diadakan di langgar; (2) Pendidikan yang diadakan di pesantren.⁷

Langgar adalah tempat peribadahan, tempat umat Islam dapat melakukan ibadahnya sesuai dengan perintah agamanya. Tempat tersebut, dikelola oleh seorang petugas yang disebut *modin* atau *amil*. Petugas ini berfungsi ganda, di samping memberikan doa pada waktu ada upacara keluarga atau desa, dapat pula ber-

³ Muh. Said, *Pendidikan Abad Kedua Puluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya* (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm. 70.

⁴ I. Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV. Ilmu, 1959), hlm. 109.

⁵ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 5-6.

⁶ *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980/1981), hlm 28.

⁷ I. Djumhur dan Danasuparta, *op. cit.*, hlm. 111-112.

BAB II

JENJANG PENDIDIKAN KOLONIAL DI BANDUNG

Pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada awalnya bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukannya. Oleh sebab itu, isi pendidikannya hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi kolonial. Sifat pendidikan seperti itu, mulai awal abad ke-20 berangsur-angsur berubah sebagai akibat lahirnya Politik Etis (*Ethische Politick*). Agar lebih sistematis di dalam melihat perkembangan pendidikan pada masa kolonial di Bandung, maka akan dibagi sebagai berikut: (1) Pendidikan Rendah; (2) Pendidikan Lanjutan; (3) Pendidikan Kejuruan; dan (4) Pendidikan Tinggi.

A. Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*)

Pada dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900, pendidikan rendah di Hindia Belanda pada umumnya dan di Bandung sebagai Ibukota Karesidenan Priangan pada khususnya, mengalami kemajuan. Pemerintah Kolonial Belanda berusaha

untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang umum bagi banyak golongan penduduk yang beranekaragam persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan sosial yang berlaku waktu itu. Pendidikan rendah ini, terdiri atas: (1) Pendidikan rendah dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda; (2) Pendidikan rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah.

1. Pendidikan Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Belanda (*Westersch Lager Onderwijs*)

Pendidikan rendah dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda (*Westersch Lager Onderwijs*) di Bandung, terdiri atas enam jenis, yaitu: (1) Sekolah Rendah Eropa atau *Europeesche Lagere School* (ELS); (2) Sekolah Cina-Belanda atau *Hollandsch Chineesche School* (HCS); (3) Sekolah Bumiputera-Belanda atau *Hollandsch Inlandsche School* (HIS); (4) Sekolah Ambon-Belanda atau *Hollandsch Ambonsche School* (HAS); (5) Sekolah Peralihan (*Schakelschool*); dan (6) Sekolah/Taman Kanak-Kanak (*Fröbelschool*). Tiap-tiap jenis sekolah tersebut, dibagi menjadi dua macam, yaitu: sekolah negeri dan sekolah bersubsidi.

1.1 Sekolah Rendah Eropa atau *Europeesche Lagere School* (ELS)

Pembukaan jalur kereta api dan perbaikan sarana Kota Bandung lainnya, mengakibatkan perusahaan-perusahaan swasta di daerah Priangan menjadi berkembang. Oleh karena itu, semakin banyak pula orang-orang Eropa yang tinggal di Kota Bandung. Guna memenuhi kebutuhan pendidikan rendah bagi anak-anak Eropa di Kota Bandung, maka didirikan *Europeesche Lagere School* (ELS). Pendirian *Europeesche Lagere School* (ELS) ini, mencontoh sekolah rendah yang ada di Negeri Belanda.¹

¹ *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Departemen

BAB V

PENGARUH PENDIDIKAN KOLONIAL TERHADAP MASYARAKAT DI BANDUNG

A. Reaksi Pendidikan Tradisional

Berdirinya pendidikan kolonial tidak lepas dari konstelasi politik Pemerintah Kolonial Belanda secara keseluruhan. Di satu sisi, pendidikan kolonial diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencetak tenaga kerja yang murah. Namun, di sisi lain penyediaan intitusi itu secara terprogram juga untuk menetralisasi kekuatan politik yang dikhawatirkan muncul dalam masyarakat pribumi yang muslim, terutama golongan santri. Secara menyeluruh, pendidikan kolonial diarahkan untuk mengubah peta sistem pendidikan yang ada di Hindia Belanda karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan politik dan kebijaksanaan Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, pesantren tidak dimasukkan ke dalam perencanaan pendidikan kolonial karena sistem pendidikan pesantren dinilai terlalu kolot. Pemerintah kolonial berpendapat bahwa sistem pendidikan pesantren sangat

jelek, baik ditinjau dari segi tujuan, metode, maupun bahasa yang dipergunakan untuk mengajar.¹ Seiring dengan perkembangan sekolah-sekolah yang disenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, secara berangsur-angsur pendidikan tradisional semakin terdesak. Gejala ini menimbulkan reaksi di kalangan ulama. Reaksi pertama berupa tindakan mengisolasi diri dari pengaruh sistem pengajaran karena dinilai akan merugikan pendidikan Islam. Selanjutnya, reaksi kedua berupa usaha memodernisasi pranata pendidikan Islam yang ada sebagai tindakan saingan bagi sistem pendidikan kolonial. Dari kaum intelektual pribumi yang pernah mengalami pendidikan kolonial menilai, sistem pendidikan kolonial telah memberi dampak negatif bagi masyarakat pribumi karena pendidikan kolonial yang berorientasi ijazah tersebut, menyebabkan tamatannya sangat tergantung dari jabatan dan lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah kolonial. Pada akhirnya, sekolah-sekolah pemerintah dianggap sebagai sarana pendidikan yang menciptakan masyarakat penggangu. Rasa tidak puas terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang melanda masyarakat pribumi sejak awal abad ke-20, memaksa para pemimpin dan cendekiawan pribumi mencari upaya untuk menemukan konsep-konsep baru pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Gerakan modernisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia, mulai tampak dengan munculnya sejumlah perguruan dan organisasi yang mendirikan sekolah-sekolah non-pemerintah. Golongan yang tidak puas karena di sekolah kolonial tidak diberikan mata pelajaran agama, khususnya agama Islam mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam. Di Negeri Belanda sendiri, telah timbul pertentangan tentang mata pelajaran agama di sekolah-sekolah, dimana undang-undang tahun 1857 menghapuskan semua pelajaran agama di

¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm 66.

BAB VI

KESIMPULAN

Munculnya sistem pendidikan kolonial di Bandung bukanlah hasil dari suatu perencanaan menyeluruh, melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial di Bandung, awalnya mendapat tantangan dari masyarakat Bandung karena kebijakan penerimaan siswa diprioritaskan bagi anak-anak dari keturunan *menak* (bangsawan). Selain itu juga, adanya sikap dari masyarakat Bandung yang anti kolonial dan menganggap pendidikan kolonial adalah kafir.

Sejak diterapkannya Politik Etis oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1900, maka pendidikan kolonial mulai mendapat perhatian serius. Berbagai jenis sekolah dari berbagai jenjang pendidikan didirikan di Bandung, mulai dari pendidikan rendah (*lager onderwijs*), pendidikan lanjutan (*middelbare onderwijs*), sampai dengan pendidikan kejuruan. Suatu peristiwa penting dalam perkembangan pendidikan kolonial di Bandung adalah dibukanya *Technische Hooge School*, sebuah sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, secara berangsur-angsur pendidikan tradisional menjadi terdesak. Gejala ini menimbulkan reaksi di kalangan *ajengan* (kyai) berupa usaha untuk memodernisasi pranata pendidikan Islam yang ada sebagai tindakan saingan bagi sistem pendidikan kolonial. Usaha-usaha pembaharuan sistem pendidikan Islam itu, kemudian menghasilkan sistem pendidikan madrasah sebagai hasil integrasi antara sistem pendidikan kolonial dengan sistem pendidikan pesantren. Pesantren yang menggunakan metode *bandungan*, selanjutnya diubah menjadi madrasah dengan menggunakan metode klasikal.

Diterapkannya pendidikan kolonial oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Bandung, juga memunculkan golongan elite baru. Hal ini disebabkan, pendidikan kolonial telah memunculkan golongan terpelajar yang dipandang oleh masyarakat Bandung sebagai golongan priyayi. Peranan dan fungsi-fungsi yang diciptakan oleh perkembangan proses birokrasi, komersialisasi, dan urbanisasi, pada akhirnya banyak dipegang oleh golongan elite baru ini.

Kota Bandung sebagai pusat kekuasaan, sumber ekonomi, dan pusat pendidikan kolonial bagi wilayah Karesidenan Priangan, memungkinkan pula menjadi tempat tumbuhnya pergerakan nasional. Keterlibatan kaum intelektual di Bandung dalam menumbuhkan nasionalisme cukup signifikan karena kaum intelektual merupakan penggerak utama dari berbagai gerakan nasionalis. Kesadaran akan kondisi yang mereka alami, diwujudkan dalam organisasi-organisasi pergerakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Manuskrip (dokumen yang tidak diterbitkan) Koleksi ANRI Jakarta

ANRI, *Besluit*, No. 84 tanggal 11 Oktober 1856, No. 26 tanggal 16 Oktober 1909, No. 32 tanggal 6 Maret 1916, No. 53 tanggal 27 Agustus 1920, No. 62 tanggal 23 Agustus 1921, No. 13 tanggal 15 Desember 1923.

ANRI, *Memorie van Overgave*, Residen Priangan L. de Steurs, 2 Januari 1921

ANRI, *Memorie van Overgave*, Residen Priangan Tengah P.R.W. van Gesseler Verschuur, Juli 1926 – September 1929.

B. Sumber Leksikografi (dokumen yang diterbitkan)

Bijblad van het Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 5516 tahun 1900; No. 10099 tahun 1922.

Koloniaal Verslag (KV), 1893, 1920.

Reegerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië, Jilid II tahun 1894,
Reegerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië, Jilid I tahun 1927.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 114 tahun 1864, No. 125 tahun 1893, No. 121 tahun 1906, No. 762 tahun 1914, No. 259 tahun 1919, No. 474 tahun 1920, No. 369 tahun 1926, No. 218 tahun 1921.

Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng, 1919.

C. Buku, Disertasi, dan Tesis

A. Suryadi, *Masyarakat Sunda dan Problema*, Bandung: Alumni, 1974.

Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, Semarang: CV. Toha Putra, 1975.

Adjat Sakri, *Dari TH Ke ITB*, Bandung: ITB, 1979.

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Basoeni, *Buku Peringatan 50 Tahun Berdirinya Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom*, Bandung; tp, 1956.

_____, *Peringatan Kota Bandung Setengah Abad*, Bandung: Kota Praja Bandung, 1956.

_____, *Perdjoangan Kemerdekaan dalam Kota Bandoeng Selajang Pandang*, Bandung; tp, 1957.

Benda, H.J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (terjemahan Daniel Dhakidae), Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Brugmans, I.J., *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië*, Gronigen-Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Mij, 1938.

Dahm, Bernhard, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Terjemahan H. Basari), Jakarta: LP3ES, 1987.

Dardji Darmodihardjo, *Analisis Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1980.

Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1986.

- De Haan, F., *Priangan: de Preanger Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*, Batavia: BGKW, 1912.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Didi Suryadi, *Panorama Budaya Jawa Barat*, Bandung: Lembaga Kebudayaan Unpad, 1981.
- Djajusman, *Bandung Lautan Api: Suatu Episode Dari Perjuangan Kemerdekaan*, Bandung: Angkasa, 1975.
- Djohan Makmur, et al., *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993.
- Edi Sedyawati, et al., *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1991.
- Edi S. Ekadjati, et al., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998.
- _____, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- _____, et al., *Sejarah Kota Bandung 1945 – 1979*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Reppublik Indonesia, 1985.
- Furnivall, J.S., *Educational Progress in Southeast Asia*, New York: International Secretariat Institute of Pasific Relations, 1943.
- Garraghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press, 1957.
- Goenarso, *Riwayat Perguruan Tinggi Teknik Di Indonesia Periode 1920 – 1942*, Bandung: Penerbit ITB, 1995.
- Gottschalk, Louis, *Understanding History A Primer of Historical Method*, New York: Alfred A. Kopf, 1956.

D. Artikel dan Makalah

Edi S. Ekadjati, “Bandung Akhir Abad Ke-19 dan Awal Abad Ke-20”, *Makalah pada diskusi panel* di Bandung.

Irchamni Sulaiman, “Pesantren Mengembangkan Teknologi Tepat Guna Ke Desa”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985.

M. Habib Chirzin, “Agama Ilmu dan Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1974.

E. Koran dan Majalah

Mooi Bandoeng, I, Agustus 1933.

Pikiran Rakyat, 20 April 1979.

Indeks

A

Ajengan,
Arab,
Ambtenar,
Ambachtsschool,

B

Bandung,
Birokrasi,
Bandungan,
Budi Utomo,
Bogor,
Batavia,
Bandoengsch Kinine Fabriek,
Besluit,
Belanda,
Banten,
bandungan

C

Cianjur,
Cina,
Cultuur Stelsel,
cacah,

D

Douwes Dekker,
Deandels

E

Elite,
Eropa,
Europeesche Lagere School,

F

Frobelschool,

G

Guru,
Gemeente

H

Hindia Belanda,
Hollandsch Inlandsch School,
Hollandsch Ambonsche School,
Hollandsch Chineesche School,
Hoofdenschool,

I

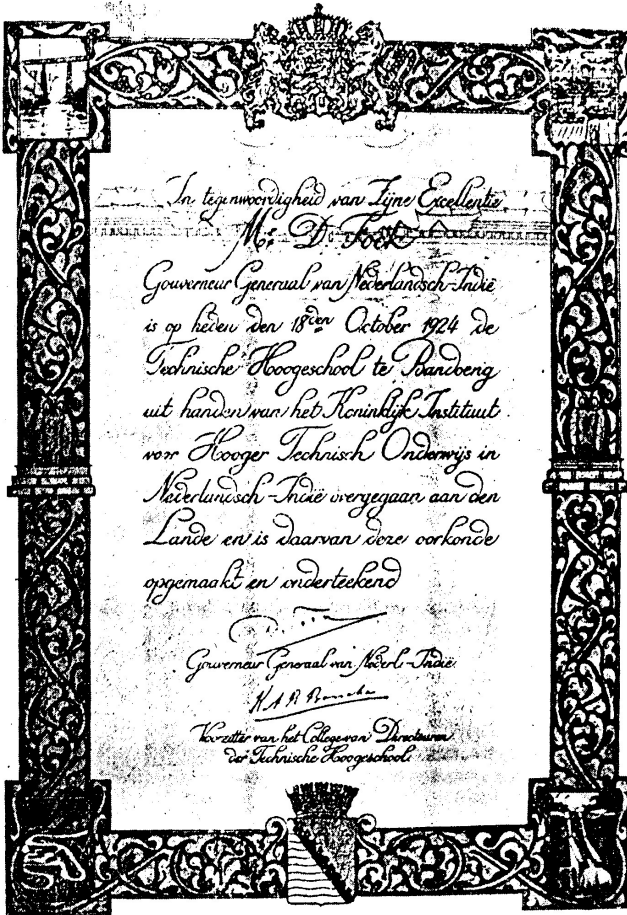
Ijasah,
Indische Partij,
Jawa,
Islam

J

Jalan Raya Pos,
Jawa Barat,
J.B.van Houtz,

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Piagam serah terima *Technische Hogeschool* Bandung



Piagam serah terima *Technische Hogeschool* Bandung dari lembaga swasta kepada Pemerintah Hindia Belanda, ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Mr. D. Fock dan Ketua *College van Directeuren*, K.A.R. Bosscha.

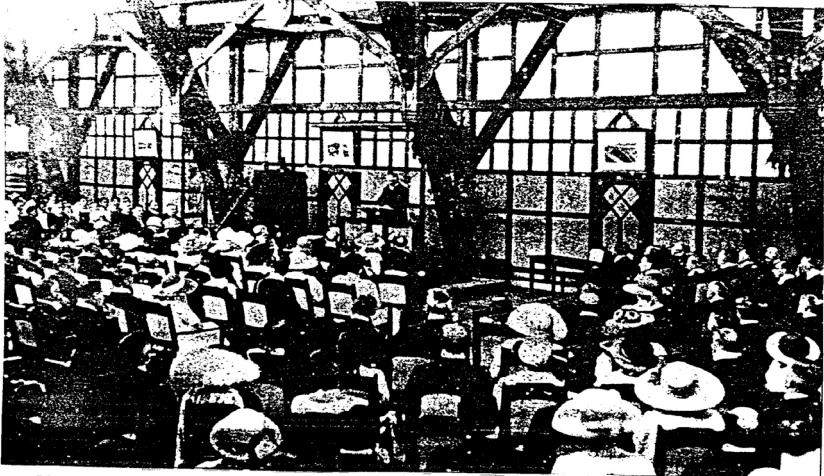
Sumber: Adjat Sakri, *Dari TH ke ITB* (Bandung: ITB, 1979), hlm. 10.

Prof. Ir. J. Klopper, Rektor Pertama *Technische Hogeschool* Bandung



Haryoto Kunto, *Semerbak Bunga di Bandung Raya* (Bandung: PT. Granesia, 1985), hlm. 365.

Upacara serah terima *Technische Hogeschool* Bandung



Upacara serah terima *Technische Hogeschool* Bandung dari lembaga swasta kepada Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Oktober 1924 di Aula *Technische Hogeschool* (sekarang Aula Barat).

Sumber: Adjat Sakri, *Dari TH ke ITB* (Bandung: ITB, 1979), hlm. 11.